

**ANALISIS ANCAMAN PRAKTIK KAPITALISME PENGAWASAN
TERHADAP MEDIA SOSIAL SEBAGAI RUANG PUBLIK**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun Oleh:

Amadeo Alhamdi

NIM: 20105010037

Pembimbing:

Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.

NIP: 197803232007101003

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

This thesis investigates the dangers surveillance capitalism poses to social media as a public sphere, utilizing Jürgen Habermas's public sphere theory as a framework. It contends that surveillance capitalism, exemplified by companies like Facebook, erodes the fundamental conditions required for a functional public sphere, including freedom of expression, access to information, and rational-critical debate. The research commences with an overview of Habermas's public sphere concept and its significance for democratic discourse. It subsequently analyzes the emergence of surveillance capitalism, referencing Shoshana Zuboff's work. Surveillance capitalism is characterized as a new form of capitalism that thrives on the extraction and commodification of personal data. The thesis asserts that surveillance capitalism is at odds with public sphere ideals because it fosters an environment of constant monitoring and manipulation, impeding rational-critical debate.

A case study of the Cambridge Analytica scandal is presented, illustrating a prime example of surveillance capitalism's threat to democracy. The scandal exposed how Cambridge Analytica, a political consulting firm, exploited personal data obtained from Facebook to direct personalized political messages to voters. The thesis concludes that surveillance capitalism significantly jeopardizes social media's role as a public sphere and democracy itself. It advocates for robust regulations to safeguard individuals' privacy and ensure social media platforms are not used to sway public opinion.

Keyword: *Public Sphere, Surveillance Capitalism, Cambridge Analytica, Big data.*

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki bahaya yang ditimbulkan oleh kapitalisme pengawasan terhadap media sosial sebagai ruang publik, dengan menggunakan teori ruang publik Jürgen Habermas sebagai kerangka kerja. Penelitian ini berargumen bahwa kapitalisme pengawasan, yang dicontohkan oleh perusahaan seperti Facebook, merusak kondisi fundamental yang diperlukan bagi ruang publik yang berfungsi, termasuk kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, dan debat rasional-kritis. Penelitian dimulai dengan tinjauan konsep ruang publik Habermas dan signifikansinya bagi diskursus demokratis. Selanjutnya, menganalisis kemunculan kapitalisme pengawasan dengan merujuk pada karya Shoshana Zuboff. Kapitalisme pengawasan digambarkan sebagai bentuk kapitalisme baru yang berkembang melalui ekstraksi dan komodifikasi data pribadi. Penelitian ini menegaskan bahwa kapitalisme pengawasan bertentangan dengan ideal ruang publik karena menciptakan lingkungan pemantauan dan manipulasi yang terus-menerus, sehingga menghambat debat rasional-kritis.

Studi kasus skandal Cambridge Analytica dipaparkan sebagai contoh nyata ancaman kapitalisme pengawasan terhadap demokrasi. Skandal tersebut mengungkap bagaimana Cambridge Analytica, sebuah firma konsultan politik, memanfaatkan data pribadi yang diperoleh dari Facebook untuk mengarahkan pesan politik yang dipersonalisasi kepada para pemilih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapitalisme pengawasan secara signifikan membahayakan peran media sosial sebagai ruang publik dan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini mengadvokasi regulasi yang kuat untuk melindungi privasi individu dan memastikan bahwa platform media sosial tidak digunakan untuk memengaruhi opini publik secara tidak etis.

Kata Kunci: Ruang Publik, Kapitalisme Pengawasan, Cambridge Analytica, Mahadata

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amadeo Alhamdi
NIM : 20105010037
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Analisis Ancaman Praktik Kapitalisme Pengawasan terhadap Media Sosial sebagai Ruang Publik adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 19 November 2024

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Amadeo Alhamdi

NIM. 20105010037

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amadeo Alhamdi

NIM : 20105010037

Judul : Analisis Ancaman Praktik Kapitalisme Pengawasan terhadap Media Sosial sebagai Ruang Publik

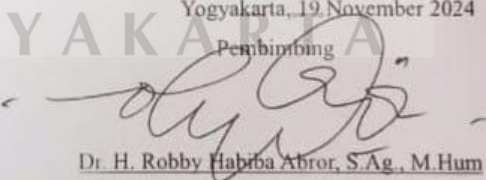
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag.) dalam bidang Aqidah dan Filsafat Islam.

Dengan ini saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 November 2024

Pembimbing


Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum

NIP. 197803232007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-51/Un.02/DU/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS ANCAMAN PRAKTIK KAPITALISME PENGAWASAN TERHADAP MEDIA SOSIAL SEBAGAI RUANG PUBLIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMADEO ALHAMDY
Nomor Induk Mahasiswa : 20105010037
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Robby Habiba Ahror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 677c384c09d07



Penguji II

Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 677dc9e906da5



Penguji III

Rizal Al Hamid, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 677f3a69b6a25



Yogyakarta, 07 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Decan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. H. Robby Habiba Ahror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 677c384c09d07

MOTO

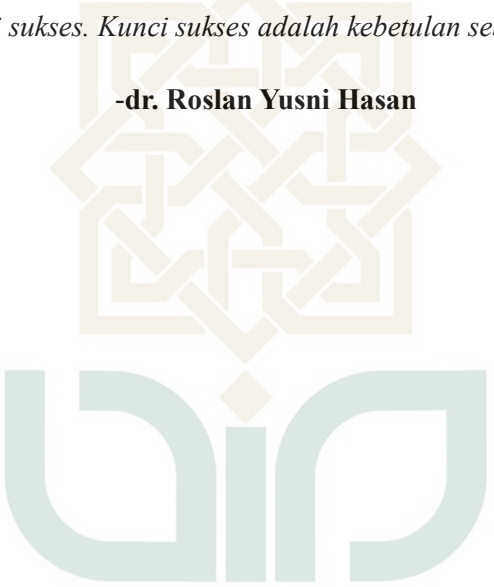
Fatum Brutum Amor Fati

Cintailah takdirmu, walaupun itu kejam.

-Friedrich Nietzsche

Kalau ada seratus orang kerja keras yang sukses dua, berarti kerja keras bukan kunci sukses. Kunci sukses adalah kebetulan sebetulnya

-dr. Roslan Yusni Hasan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Ancaman Praktik Kapitalisme Pengawasan terhadap Media Sosial sebagai Ruang Publik”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pada kita selaku umatnya.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Ibu Desi dan Bapak Andrie selaku kedua orang tua penulis yang telah mendukung dan percaya terhadap jalan yang penulis tempuh dalam jenjang pendidikan tinggi ini.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak saran dan semangat motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Dr. Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum selaku ketua prodi Aqidah dan Filsafat Islam yang senantiasa menanggapi penulis untuk berdiskusi mengenai berbagai topik filsafat sebelum akhirnya menemukan tema yang cocok untuk skripsi penulis.
5. Ibu Prof. Fatimah, M.A., Ph.D. yang memberikan banyak wawasan mengenai penulisan ilmiah.

6. Bapak Rizal Al Hamid, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Seluruh Dosen Prodi Aqidah dan Filsafat Islam yang telah membagikan pengalaman dan ilmunya.
8. Bapak Sugeng Sarwono selaku Staff TU yang telah memberikan bantuan demi kelancaran tugas akhir ini.
9. M. Rosifa yang telah membantu dan meluangkan banyak waktu untuk penulis bertanya mengenai berbagai hal dalam penulisan serta mengurus berkas-berkas skripsi.
10. Manusia-manusia yang menemani penulis dalam berbagai diskusi malam hari di kost nuklir atau di berbagai tempat lainnya, Amir, Muji, Muammar, Aziz, Syaban.
11. Seluruh kawan-kawan prodi Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2020.
12. Sofia Rizkia yang telah membawakan langsung literatur fisik asli Mazhab Frankfurt, terutama tulisan terbaru Jurgen Habermas dari Berlin yang jauh di sana.
13. Kawan SMP yang sama-sama berkuliah di UIN Nisa dan Iqbal.
14. Kawan-kawan Pppppantai Siti, Soraya, Nina, Fathiya.
15. Mahdi alias Josep dan Bapak Mansur yang kerap kali bertemu di samping mushola fakultas yang mengiringi perjalanan kepengurusan tugas akhir penulis.
16. Dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga curahan Rahmat Allah tetap terlimpahkan kepada kita semua. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap yang membacanya.

Yogyakarta, 9 Januari 2025

Amadeo Alhamdi

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN	vi
MOTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sumber Data	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Ruang Publik	15
1. Biografi Jurgen Habermas	15
2. Demokrasi Deliberatif	18
3. Ruang Publik	21
4. Media Sosial sebagai Ruang Publik Digital	23
B. Kapitalisme Pengawasan	25
C. Manipulasi Politik	28
1. Propaganda	28
2. Manipulasi Politik Menurut Riker	30
3. Propaganda Menurut Herman dan Chomsky	32

4. Manipulasi Politik di Era Digital.....	39
BAB III STUDI KASUS: KETERLIBATAN CAMBRIDGE ANALYTICA DALAM KAMPANYE TRUMP DAN BREXIT	57
A. Apa itu Cambridge Analytica	57
B. Memanfaatkan Kelemahan yang Dimiliki Facebook.....	59
C. Mekanisme Operasi	59
D. Kampanye Trump	63
E. Kampanye Brexit.....	66
F. Keberlanjutan Skandal.....	69
G. Hasil Investigasi Terbaru	73
H. Struktur Regulasi yang Menguntungkan	76
BAB IV ANALISIS.....	81
A. Praktik Kapitalisme Pengawasan Dibalik Media Sosial Facebook	81
B. Ancaman Kapitalisme Pengawasan terhadap Ruang Publik	85
1. Mengancam Kedaulatan Individu.....	85
2. Mengancam Sistem Bebas Aktif Media	85
3. Mengancam Proses Deliberasi	86
4. Munculnya Sekat Dunia Maya (Gelembung Filter).....	89
5. Munculnya Ruang Publik Palsu	90
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat modern berkembang menuju masyarakat jejaring yang didukung oleh teknologi informasi. Sangat penting bagi masyarakat untuk membentuk jejaring, terutama setelah Perang Dunia II berakhir. Infrastruktur sosial, ekonomi, dan pendidikan yang rusak akibat perang mulai dipulihkan oleh masyarakat. Berbagai pabrik membentuk relasi satu sama lain dalam berbagi informasi untuk memenuhi kebutuhan produksi dan distribusi. Produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa yang meningkat menunjukkan kembalinya industrialisasi. Internet membuat masyarakat saling terhubung secara global.¹

Pergeseran cara komunikasi, yaitu dari komunikasi melalui media elektronik konvensional ke media baru, yang merupakan kombinasi teknologi internet, telekomunikasi seluler, dan media massa. Televisi dan radio adalah media elektronik yang menyampaikan informasi secara searah dan terpusat (dari satu stasiun televisi ke banyak orang). Perpaduan antara komputer, telepon seluler, dan media massa telah menghasilkan bentuk komunikasi baru yang disebut "komunikasi massa secara masif", yang memiliki karakteristik yang semakin interaktif, personal, fleksibel, terdesentralisasi, terlibat, dan kolaboratif, yang memungkinkan adanya "virtus komunikasi massa".²

Web 2.0 (juga disebut sebagai aplikasi "media sosial") adalah aplikasi perangkat lunak berbasis internet yang berkembang dari Web 1.0, yang memungkinkan penggunaannya hanya berfungsi sebagai pencari atau penerima informasi di www, yang bersifat statis. Sementara itu, pengguna Web 2.0 dapat berinteraksi secara interaktif dan mengelola konten

¹ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society (The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume 1) 2nd Edition* (West Sussex: Wiley-Blackwell A John Wiley & Sons Ltd. Publication, 2010).

² *Ibid.*

informasi mereka sendiri dengan membuat, mengubah, mendistribusikan, atau hanya mengonsumsi data menghasilkan ruang sosial virtual.³ Oleh karena itu, pengguna Web 2.0 tidak hanya berperan sebagai konsumen yang menerima informasi; mereka juga dapat menjadi pencipta, penyiar, perantara, dan penilai informasi. Web 2.0 disebut memiliki karakter “partisipatoris dan kolaboratif” oleh Kaplan dan Haenlein.⁴ Web 2.0 juga memiliki keunggulan karena sifatnya yang “relasional”, berbeda dengan Web 1.0 yang bersifat “informatif” seperti diungkapkan oleh Mark Pegrum.⁵ Media sosial sekarang memungkinkan komunikasi berlangsung secara dialogis dan interaktif daripada searah.

Pemahaman baru tentang ruang publik dibawa oleh kemajuan teknologi internet. Dengan kemajuan dalam teknologi internet, konsep ruang publik dapat diperluas. Yaitu ruang publik virtual yang memungkinkan diskusi politik dilakukan dalam dunia maya di antara individu yang saling terhubung secara global dengan kemudahan mendapatkan data.⁶

Media sosial, sebagai aplikasi internet generasi kedua yang memiliki sifat partisipatoris, kolaboratif, atau relasional, dapat digunakan sebagai ruang publik virtual yang bersifat politis. Media sosial digunakan sebagai sarana tindakan politis. Selain digunakan untuk keperluan pertemanan atau komunikasi keluarga, warga masyarakat menggunakan media sosial untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu sebagai sarana untuk secara

³ Christian Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction* (London, 2014), <https://sk.sagepub.com/books/social-media-a-critical-introduction>.

⁴ Andreas M. Kaplan and Michael Haenlein, “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media”, *Business Horizons*, vol. 53, no. 1 (2010), pp. 59–68, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681309001232>.

⁵ Mark Pegrum, *From Blogs to Bombs: The Future of Digital Technologies in Education* (Crawley, Western Australia: UWA Publishing, 2009).

⁶ Zizi Papacharissi, “The virtual sphere: The internet as a public sphere”, *New Media & Society*, vol. 4, no. 1 (SAGE Publications, 2002), pp. 9–27, <https://doi.org/10.1177/1461444022226244>.

independen dan otonom mengkomunikasikan gagasan dan aspirasi kritis mereka melalui komunikasi online.⁷

Media sosial adalah alat yang ideal untuk kepentingan politik warga karena dapat digunakan sebagai ruang publik digital juga dikenal sebagai "digital public sphere" atau "agora virtual" yang memungkinkan diskusi publik melalui argumentasi rasional dilakukan di seluruh dunia (global) tanpa dibatasi oleh batas negara.⁸

Pentingnya media sosial sebagai alat bagi individu untuk berpartisipasi secara politik, termasuk mengorganisir atau membentuk asosiasi, melakukan voting dan kampanye, menggerakkan massa demonstrasi, melakukan boikot dan petisi, dan melakukan aktivisme sosial lainnya dari tingkat lokal hingga internasional. Selain itu, media sosial membantu media konvensional karena digitalisasi saat ini membuat proses dialogis atau diskursif antarwarga menjadi semakin mudah, cepat, dan luas. Melalui komunitas sosial dalam dunia maya, partisipasi politis warga dapat diwujudkan secara virtual.⁹

Ketika melihat media sosial dibandingkan dengan media konvensional, gagasan bahwa media sosial sebagai ruang publik semakin didukung karena fakta bahwa mereka memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menyebarkan informasi secara tidak terbatas. Media sosial juga dianggap menarik oleh penggunanya sebagai ruang publik karena memberikan banyak pilihan untuk berkomunikasi melalui kelompok atau individu serta memungkinkan komunikasi yang setara.¹⁰

⁷ FX. Rudi Setiawan, "Peran Media Sosial Sebagai Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Gagasan Ruang Publik Jürgen Habermas", *Melintas*, vol. 39, no. 3 (2024), pp. 323–50.

⁸ Leocadia Díaz Romero, *On the Web and Contemporary Social Movements BT - Social Media in Politics: Case Studies on the Political Power of Social Media*, ed. by Bogdan Pătruț and Monica Pătruț (Cham: Springer International Publishing, 2014), pp. 19–33, https://doi.org/10.1007/978-3-319-04666-2_2.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Lisa M. Kruse, Dawn R. Norris, and Jonathan R. Flinchum, "Social Media as a Public Sphere? Politics on Social Media", *The Sociological Quarterly*, vol. 59, no. 1 (Routledge, 2018), pp. 62–84, <https://doi.org/10.1080/00380253.2017.1383143>.

Selain peluang yang ada, ada beberapa masalah dengan media sosial untuk menjadi ruang publik Habermas. Media sosial dianggap kurang sesuai untuk digunakan sebagai alat untuk diskusi rasional secara efektif. Ide tentang apa yang Jurgen Habermas sebut sebagai ruang publik rasanya sulit untuk dimanifestasikan dalam media sosial.

Karena data data penggunaanya dijadikan komoditas oleh perusahaan penyedia jasa media sosial. Privasi pengguna dicuri oleh perusahaan untuk tujuan komersial, seperti menjual nama, minat, lokasi, data diri teman, dan sebagainya. Perusahaan penyedia layanan media sosial ternyata juga melakukan praktik oligopoli dan monopoli seiring dengan komodifikasi data pengguna. Di bawah keadaan ini, kritik yang dilakukan para aktivis sosial menjadi tidak efektif. Ini karena media sosial adalah medium untuk para aktivis sosial menyuarakan suara mereka, tetapi di sisi lain, penyedia media sosial dapat mengontrol pendapat mereka. Pada akhirnya, sistem kapitalisme yang terdapat dalam media sosial membatasi kebebasan pribadi penggunaanya. Sulit untuk menghindari pengaruh kekuasaan di media sosial karena tidak bebas nilai.¹¹

Korporasi yang menyediakan layanan media sosial mengontrol data pengguna dengan menggunakan teknologi dan algoritma mereka untuk memanipulasi dan memanfaatkan data pribadi pengguna sehingga membuat mereka terus menggunakan media sosial. Di sini, Shoshana Zuboff menyebut penggunaan data oleh perusahaan teknologi internet untuk mendapatkan keuntungan sebagai Kapitalisme Pengawasan atau Surveillance Capitalism. Zuboff membahas bagaimana internet menjadi sarana untuk mengubah dan menghisap kekayaan dan transformasi kapitalisme. Zuboff mengatakan bahwa kapitalisme telah berkembang

¹¹ Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction*.

menjadi bentuk yang sangat inventif meskipun bentuk operasinya tidak terlihat secara nyata.¹²

Kapitalisme pengawasan, dalam pengejarannya yang tanpa henti terhadap ekstraksi data dan keuntungan, mendorong penyebaran informasi yang salah dan mengikis integritas informasi. “Kebutaan karena desain,” seperti yang dicontohkan oleh algoritma Facebook yang memprioritaskan keterlibatan di atas kebenaran, menciptakan lingkungan di mana informasi yang salah tumbuh subur, membuat warga negara sulit membedakan fakta dari fiksi dan merusak pengambilan keputusan yang terinformasi, yang merupakan landasan demokrasi yang berfungsi dengan baik.¹³ Menurut Habermas, demokrasi deliberatif hanya dapat dilaksanakan ketika media bebas dari pengaruh kepentingan negara dan politik, dan warga masyarakat aktif berpartisipasi dalam diskusi tentang masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain, media sosial kehilangan potensinya sebagai ruang publik ketika berfungsi untuk kepentingan kekuasaan dan masyarakat tidak terlibat secara kritis dalam diskusi publik.¹⁴

Dari penjelasan tersebut, Kapitalisme pengawasan yang mana beroperasi dibalik media sosial dikhawatirkan bisa mengancam potensi media sosial sebagai ruang publik dan mengakibatkan kemunduran proses demokrasi. Untuk menganalisis ancaman yang dilakukan dalam praktik kapitalisme pengawasan terhadap kemampuan media sosial dalam berfungsi sebagai tempat baru bagi pengembangan ruang publik, pertama tama kita perlu mengetahui kondisi yang diperlukan untuk ruang publik. Kemudian, kita perlu memeriksa apakah praktik kapitalisme pengawasan

¹² Shoshana Zuboff, *“The age of surveillance capitalism : the fight for a human future at the new frontier of power”*, Fight for a human future at the new frontier of power, First edit edition (New York: PublicAffairs, 2019).

¹³ Shoshana Zuboff, *“Surveillance Capitalism or Democracy? The Death Match of Institutional Orders and the Politics of Knowledge in Our Information Civilization”*, Organization Theory, vol. 3, no. 3 (SAGE Publications Ltd, 2022), p. 26317877221129290, <https://doi.org/10.1177/26317877221129290>.

¹⁴ Setiawan, *“Peran Media Sosial Sebagai Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Gagasan Ruang Publik Jürgen Habermas”*.

ini betul betul mengancam kondisi tersebut yang dirangkum Habermas dalam gagasan ruang publik. Karenanya dengan menganalisis pemikiran Habermas tentang ruang publik melalui konsep milik shoshana Zuboff tentang kapitalisme pengawasan merupakan tulisan yang menarik untuk dibahas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka terdapat satu rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana menjelaskan bahwa praktik kapitalisme pengawasan mengancam media sosial sebagai ruang publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang hendak peneliti jawab, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Mengetahui bagaimana praktik kapitalisme pengawasan mengancam media sosial sebagai ruang publik.

D. Tinjauan Pustaka

Secara keseluruhan, ada cukup banyak penelitian yang berkaitan dengan media sosial sebagai ruang publik dan publikasi tentang ancaman dibalik kapitalisme pengawasan. Namun, jika kedua tema tersebut digabungkan dalam satu penelitian, seperti pada penelitian ini, maka penelitian tentang ancaman kapitalisme pengawasan terhadap media sosial sebagai ruang publik belum pernah ada. Ada beberapa penelitian yang masih berhubungan dengan topik penelitian yang akan dibahas penulis dalam upaya untuk mendukung penelitian ini.

Pertama, artikel berjudul “Konsumerisme Hingga Hiper-Realitas Politik Di Ruang Publik Baru Era Cyber Space(Antara Kemunduran Atau Kemajuan Bagi Pembangunan Negara Indonesia Yang Demokratis)” oleh Rifi Rivani Radiansyah yang diterbitkan Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politi

Universitas Bale Bandung pada tahun 2019. Artikel ini membahas bagaimana pergeseran Indonesia dari masyarakat berbasis “publik” menjadi masyarakat berbasis “konsumen”, yang dipengaruhi oleh globalisasi dan penerapan prinsip Reinventing Government, telah memicu konsumerisme, khususnya di ranah digital. Pergeseran budaya ini, ditambah dengan dominasi struktur media oligarki, telah menciptakan lingkungan yang matang untuk hiperrealitas politik, khususnya selama pemilu 2019. Radiansyah berpendapat bahwa hiperrealitas ini, yang dipicu oleh aliran informasi komoditas yang terus-menerus dan publik yang reaktif, mengancam perkembangan demokrasi Indonesia yang sehat. Namun, ia tetap optimis, dengan menyatakan bahwa dengan menumbuhkan kesadaran kritis dan mempromosikan "naturalisasi" konsumsi yang terinformasi, warga negara Indonesia dapat merebut kembali nilai-nilai demokrasi dalam ruang digital.¹⁵ Pada artikel tersebut membahas persoalan ancaman ruang publik baru (internet) menggunakan perspektif Jean Baudrillard, sedangkan pada penelitian ini menggunakan konsep kapitalisme pengawasan.

Kedua, artikel berjudul “Menyoal Internet Sebagai Ruang Publik Dalam Perspektif Habermas” oleh Eben Haezer yang diterbitkan oleh Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang pada tahun 2018. Eben Haezer mengkaji peran internet sebagai ruang publik melalui sudut pandang teori Jürgen Habermas. Artikel ini menganalisis evolusi historis ruang publik, dari asal-usulnya di kedai kopi Eropa abad ke-18 hingga manifestasi modernnya di ruang digital. Artikel ini menyelidiki apakah internet memenuhi kriteria ruang publik ideal, yang dicirikan oleh egalitarianisme, kebebasan dari dominasi, dan inklusivitas. Penulis mengeksplorasi potensi platform daring untuk mendorong musyawarah demokratis dan memfasilitasi partisipasi warga dalam wacana

¹⁵ Rifi Rivani Radiansyah, “Konsumerisme Hingga Hiper-Realitas Politik Di Ruang Publik Baru Era Cyber Space (Antara Kemunduran Atau Kemajuan Bagi Pembangunan Negara Indonesia Yang Demokratis)”, JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 3, nos. 2 SE-Articles (2019), pp. 30–47, <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/116>.

publik. Pengaruh budaya visual pada interaksi daring dan tantangan yang ditimbulkan oleh kepentingan komersial dan dominasi aktor media mapan juga dipertimbangkan. Pada akhirnya, artikel ini mempertanyakan apakah internet benar-benar dapat memenuhi potensi demokratisnya.¹⁶ Dari pemaparan tersebut sudah jelas bahwa penulis artikel tersebut hanya menyelidiki apakah internet dapat dikatakan sebagai ruang publik ideal dan berakhir pada ketergantungan apakah internet betul betul bisa memenuhi fungsi demokratisnya dengan memaparkan penjelasan dari berbagai ahli, sedangkan dalam penelitian ini ingin berargumen bahwa media sosial sudah tidak bisa lagi diharapkan sebagai ruang publik yang ideal karena ada praktik kapitalisme pengawasan yang mengancam.

Ketiga, artikel akademis yang berjudul “Media Baru, Ruang Publik Baru, dan Transformasi Komunikasi Politik di Indonesia”, oleh Salvatore Simarmata pada tahun 2014, mengeksplorasi pengaruh transformatif media baru terhadap komunikasi politik dalam demokrasi Indonesia. Simarmata berpendapat bahwa platform media baru telah merevitalisasi ruang publik dengan memungkinkan aliran komunikasi politik yang terdesentralisasi dan dari bawah ke atas. Artikel ini meneliti karakteristik dan struktur media baru, membandingkannya dengan media tradisional. Artikel ini juga menganalisis berbagai platform dan inisiatif daring Indonesia, seperti e-government dan kampanye pendidikan politik yang dipimpin warga negara, dengan menyoroti bagaimana hal ini menunjukkan lanskap keterlibatan politik yang terus berkembang di negara ini. Terakhir, penulis mengakui tantangan kesenjangan digital Indonesia, dengan menekankan perlunya akses yang adil terhadap teknologi dan literasi digital untuk sepenuhnya mewujudkan potensi demokrasi media baru. Penjelasan tersebut sudah sepakat bahwa media baru dapat memberi kontribusi yang besar bagi

¹⁶ Eben Haezer, “*Menyoal Internet Sebagai Ruang Publik Dalam Perspektif Habermas*”, Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, vol. 4, no. 2 (2018), p. 181.

demokrasi.¹⁷ Kontribusi tersebut berupa terbentuknya ruang publik yang universal, namun masih terdapat ancaman untuk terbentuknya ruang publik baru ini, yaitu terkait kesenjangan, pemahaman masyarakat, dan belum meratanya akses internet, sedangkan ancaman dalam tulisan kali ini adalah praktik kapitalisme pengawasan.

Keempat, Artikel berjudul “Upaya Partai Politik Dalam Memanfaatkan Demokrasi Virtual di Era Digital” oleh Ambia B. Boestam, dkk. dalam Jurnal Pustaka Komunikasi pada tahun 2023. Mereka menganalisis bagaimana partai politik memanfaatkan perangkat digital seperti media sosial dan situs web untuk melakukan pemasaran dan komunikasi politik, khususnya dalam menjangkau calon pemilih secara daring. Studi ini menekankan bahwa pergeseran menuju "demokrasi digital" ini didorong oleh faktor-faktor seperti pandemi COVID-19 dan meningkatnya penggunaan internet dan perangkat seluler di Indonesia. Terlepas dari potensi manfaatnya, studi ini juga mengakui adanya tantangan seperti kesenjangan digital, penyebaran misinformasi, dan potensi polarisasi politik di ranah daring. Para penulis menyimpulkan dengan menekankan perlunya keterlibatan yang etis dan terinformasi dengan perangkat digital untuk mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan efektif di Indonesia.¹⁸ Tantangan yang disebutkan dari pemaparan artikel jurnal tersebut tidak spesifik mengatakan bahwa ada system besar yang lebih mengancam seperti kapitalisme pengawasan, melainkan hanya menjelaskan adanya penyebaran misinformasi, dan potensi polarisasi politik yang terjadi di internet.

Kelima, subbab artikel yang berjudul “Ekspresi Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial: Telaah Kritis Ruang Publik Habermas” oleh Rahman Asri dalam buku Digitalisasi dan Humanisme dalam Ekonomi

¹⁷ Salvatore Simarmata, “*Media Baru, Ruang Publik Baru, dan Transformasi Komunikasi Politik di Indonesia*”, *Interact*, vol. 3 No.2 (2020), pp. 18–36.

¹⁸ Ambia B. Boestam, Adi Prakosa, and Bhakti Nur Avianto, “*Upaya Partai Politik Dalam Memanfaatkan Demokrasi Virtual Di Era Digital*”, *Jurnal Pustaka Komunikasi*, vol. 6, no. 1 (2023), pp. 1–17.

Kreatif pada tahun 2021. Artikel Rahman Asri mengeksplorasi peran media sosial sebagai ruang publik baru dalam konteks politik Indonesia. Mengacu pada konsep ruang publik Jürgen Habermas, Asri meneliti bagaimana platform media sosial memfasilitasi wacana dan perdebatan publik, yang berpotensi mendorong partisipasi demokratis. Namun, artikel tersebut juga mempertimbangkan pembatasan internet oleh pemerintah Indonesia di Papua, yang menyoroti ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kontrol negara.¹⁹ Asri menganalisis liputan berita tentang pembatasan ini, yang mengungkap perspektif yang kontras tentang implikasi bagi demokrasi dan kebebasan informasi di Indonesia yang sudah sangat jelas berbeda dengan tulisan ini, dalam analisisnya Asri mengatakan bahwa negara lah yang mengontrol kebebasan ekspresi dalam platform media sosial sebagai ruang publik baru, sedangkan dalam tulisan ini ingin membahas dengan kapitalisme pengawasan lah yang mengancam ruang publik baru ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan dalam bidang penelitian filsafat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penulis mengikuti jalan pikiran dan perspektif seorang filsuf sehingga menghasilkan objek formal yang filosofis.²⁰

Dalam penelitian ini, praktik kapitalisme pengawasan seperti yang dijelaskan oleh Shoshana Zuboff menjadi suatu fenomena yang dapat mengancam apa yang Jürgen Habermas sebut sebagai ruang publik, khususnya ruang publik di era internet. untuk mendalami pemahaman tentang kapitalisme pengawasan dan ruang publik, memungkinkan

¹⁹ Rahman Asri, *Ekspresi kebebasan berpendapat di media sosial: Telaah kritis ruang publik Habermas* (2020).

²⁰ Anton Bakker and Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), p. 63.

peneliti untuk mencari data data deskriptif dan mengeksplorasi terkait dengan objek objek penelitian berupa praktik kapitalisme pengawasan dan konsep ruang publik. atas dasar pilihan penelitian kualitatif yang digunakan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan metode penelitian, menentukan teknik pengumpulan data, dan menganalisis data tersebut.

F. Sumber Data

Sebelum memulai tahap pengumpulan data, penting untuk memastikan bahwa sumber data yang digunakan untuk penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data dapat dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder.²¹

a. Data Primer

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah literatur utama yang berkaitan dengan subjek penelitian, yaitu dimulai dengan karya tokoh yang relevan.²² Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah karya dari Jurgen Habermas yang membahas tentang ruang publik dan Shoshana Zuboff yang membahas tentang kapitalisme pengawasan.

b. Data Sekunder

Sumber data pendukung dari berbagai sumber literatur, seperti monografi atau karangan khusus tentang tokoh dan filsafat mereka yang masih relevan dengan topik penelitian ini disebut sebagai sumber data sekunder.²³ Dalam hal ini berbagai karya seperti buku, artikel jurnal atau sumber lainnya yang membahas tentang topik dalam penelitian ini, baik itu mengenai ruang publik atau kapitalisme pengawasan.

2. Teknik Pengumpulan Data

²¹ M... Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), p. 148.

²² Bakker and Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, p. 63.

²³ Bakker and Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*.

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yang berarti mencari semua buku yang ada mengenai tokoh dan topik yang bersangkutan dan meninjau kepustakaan umum dan khusus, baik berupa data primer atau sekunder dari berbagai buku umum, ensiklopedi, dan buku sistematis atau tematis.²⁴ Dalam hal ini, data sekunder tersebut harus berkaitan dengan topik ruang publik atau kapitalisme pengawasan.

3. Teknik Analisis Data

Setelah klasifikasi dan pengumpulan data selesai, langkah penelitian selanjutnya adalah analisis data. Analisis data sangat penting untuk menformulasikan data yang diperoleh untuk menghasilkan konstruksi teoritis dan menemukan pola sistematis dari filsuf yang merupakan objek material filsafat.²⁵ Oleh karena itu, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan disusun secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang objektif. Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif analisis data digunakan untuk memberikan gambaran mendalam tentang pemikiran atau konsepsi individu yang menjadi objek material penelitian. Selanjutnya, pemikiran individu tersebut diselidiki dari perspektif filsafat sebagai objek formal penelitian.²⁶ Untuk mengidentifikasi perspektif Shosana Zuboff dan Jurgen Habermas secara akurat, metode deskriptif ini akan menguraikan secara teratur ide-ide mereka tentang kapitalisme pengawasan dan ruang publik.

b. Metode Interpretasi

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*.

²⁶ Bakker and Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, p. 65.

Dengan menggunakan teknik interpretasi dalam menganalisis data, peneliti dapat menyelami makna filosofis dan nilai-nilai penting yang terkandung dalam konsepsi tokoh yang dikaji secara ketat. Penulis dapat mencapai kebenaran asli dengan bergantung pada bukti yang jelas.²⁷ Penelitian ini menggunakan konsep ruang publik Jürgen Habermas dan *surveillance capitalism* Shoshana Zuboff untuk menginterpretasikan makna dan signifikansinya, kemudian menghubungkannya satu sama lain untuk melihat ancaman antara praktik kapitalisme pengawasan dan ruang publik.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama memberikan pendahuluan dan memberikan gambaran tentang latar belakang penelitian, tujuan, dan metode yang digunakan.

Bab kedua berbicara tentang Gambaran umum secara deskriptif terkait konsep ruang publik dan memberikan pendapat dari berbagai ahli bahwa media sosial memungkinkan untuk dijadikan ruang publik. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui hal mendasar yang diperlukan dalam ruang publik, sehingga melihat kemungkinan media sosial sebagai ruang publik.

Bab ketiga berbicara tentang Gambaran umum tentang kapitalisme pengawasan secara deskriptif. Pada bab ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana logika kapitalisme pengawasan bekerja dan membahas perbandingannya dengan versi kapitalisme sebelumnya.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini yang berisi analisis tentang praktik kapitalisme pengawasan yang dikaitkan dengan ruang publik era

²⁷ *Ibid.*, p. 43.

media sosial. Disini akan dijelaskan bagaimana kapitalisme pengawasan mengancam potensi sosial media sebagai ruang publik.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini. Bagian penutup berisi tentang Kesimpulan dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Skandal Cambridge Analytica menjadi ilustrasi yang relevan tentang manipulasi politik di era digital. Studi ini menunjukkan bahwa Cambridge Analytica bukan sekadar konsultan politik biasa, melainkan laboratorium eksperimen ilmiah yang didukung oleh investasi besar-besaran. Dengan menggunakan teknologi digital, mereka merancang metode manipulasi baru yang bertujuan memecah belah masyarakat dan mengarahkan hasil pemilu sesuai kepentingan tertentu.

Fenomena Cambridge Analytica melambangkan kemunculan teknik komunikasi politik baru, propaganda digital, dan manipulasi pemilu yang memanfaatkan pasar monopoli digital yang tidak terkendali. Melalui eksploitasi data pribadi, skandal ini tidak hanya memperingatkan risiko teknologi terhadap proses demokrasi tetapi juga menunjukkan bagaimana opini publik dapat dimanipulasi secara sistematis. Konsekuensi dari praktik ini sangat serius terhadap integritas demokrasi.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan privasi individu. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya aspek hifdzun an-nafs (menjaga jiwa) dan hifdzun maal (menjaga harta). Al-Qur'an dan Hadis juga secara eksplisit menekankan pentingnya menjaga privasi orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 27:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat."

Hadis Rasulullah SAW juga mendukung prinsip ini, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim: "Apabila seseorang menengok atau melihat ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu kamu melemparnya

dengan batu kerikil hingga tercungkil matanya, maka tidak ada dosa bagimu." Selain itu, dalam riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang melihat tulisan saudaranya tanpa seizinnya maka sesungguhnya ia telah melihat kepada Neraka."

Dalam kaitannya dengan ruang publik, penelitian ini mengungkap bahwa baik secara teoretis maupun praktis, ruang publik mengalami krisis yang mendalam. Cambridge Analytica menjadi contoh nyata pergeseran peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas warga negara dalam demokrasi. Jika dievaluasi melalui konsep ruang publik Habermas, skandal ini menunjukkan bahwa deliberasi bebas dalam ruang publik modern telah tergantikan oleh manipulasi berbasis teknologi dan kepentingan politik tertentu.

Kesimpulannya, tantangan ini menegaskan bahwa ruang publik, yang seharusnya menjadi tempat diskusi bebas, kini menjadi arena manipulasi yang terfragmentasi. Pengaruh politik berbasis data besar (*big data computational politics*) telah mengikis ruang publik sebagai kepentingan bersama. Seperti yang ditegaskan Habermas, demokrasi yang sehat membutuhkan ruang publik yang memungkinkan kedaulatan warga dan pembentukan kehendak bebas melalui debat terbuka. Namun, dalam era digital, ideal-ideal tersebut berada di bawah ancaman serius. Oleh karena itu, ruang publik digital memerlukan reformasi mendasar untuk memulihkan integritas demokrasi.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa idealisasi ruang publik seperti yang awalnya dikonseptualisasikan telah menghadapi tantangan yang signifikan. Pergeseran besar ke ranah privat yang dimungkinkan oleh politik berbasis data besar (*big data computational politics*) telah mengikis ruang publik sebagai sebuah kepentingan bersama. Habermas, dalam proyek hidupnya, menegaskan pentingnya ruang publik bersama, kedaulatan warga, dan pembentukan kehendak bebas melalui debat terbuka sebagai fondasi esensial demokrasi. Analisis ini menunjukkan bahwa ideal-

ideal tersebut kini berada dalam ancaman serius dalam ruang publik era digital.

B. Saran

Dalam tulisan ini, saya telah meneliti ancaman kapitalisme pengawasan terhadap media sosial sebagai ruang publik melalui perspektif teori ruang publik Jürgen Habermas. Namun, fenomena kapitalisme pengawasan memiliki dimensi yang sangat luas dan kompleks sehingga memerlukan eksplorasi lebih lanjut dari berbagai sudut pandang.

Saya menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat meninjau kapitalisme pengawasan dari sisi implikasi etik, terutama dengan mendalami pemikiran para filsuf Muslim. Perspektif etika ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab dalam tradisi filsafat Islam dapat memberikan kerangka alternatif untuk memahami dan menanggapi ancaman kapitalisme pengawasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Rahman, *Ekspresi kebebasan berpendapat di media sosial: Telaah kritis ruang publik Habermas*, 2020.
- Bakker, Anton and Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Barnett, Anthony, "Democracy and the Machinations of Mind Control", *The New York Review*, 2017, <https://www.nybooks.com/online/2017/12/14/democracy-and-the-machinations-of-mind-control/>, accessed 1 Oct 2024.
- BBC, *Vote Leave's targeted Brexit ads released by Facebook*, 2018, <https://www.bbc.com/news/uk-politics-44966969>, accessed 1 Oct 2024.
- Beebe, Megan and David Stauss, "FTC Issues Opinion and Order Against Cambridge Analytica for Deceiving Facebook Users", *Federal Trade Commission*, 2019, <https://www.bytebacklaw.com/2019/12/ftc-issues-opinion-and-order-against-cambridge-analytica-for-deceiving-facebook-users/>, accessed 3 Jan 2025.
- Benkler, Yochai, Robert Faris, and Hal Roberts, *Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics*, Oxford University Press, 2018 [<https://doi.org/10.1093/oso/9780190923624.001.0001>].
- Biddle, Sam, "Facebook Uses Artificial Intelligence to Predict your future ACTIONS", *Intercept*, 2018, <https://theintercept.com/2018/04/13/facebook-advertising-data-artificial-intelligence-ai/>, accessed 1 Oct 2024.
- Boestam, Ambia B., Adi Prakosa, and Bhakti Nur Avianto, "Upaya Partai Politik Dalam Memanfaatkan Demokrasi Virtual Di Era Digital", *Jurnal Pustaka Komunikasi*, vol. 6, no. 1, 2023, pp. 1–17 [<https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i1.2281>].
- Booth, Robert, "Facebook reveals news feed experiment to control emotions", *The Guardian*, 2014.
- Boulianne, Shelley, "Online news, civic awareness, and engagement in civic and political life", *New Media & Society*, vol. 18, no. 9, SAGE Publications, 2015, pp. 1840–56 [<https://doi.org/10.1177/1461444815616222>].
- Briant, Emma Louise, "Propaganda and Counter-terrorism: Strategies for Global Change", *Manchester University Press*, 2015, <https://www.manchesterhive.com/view/9781847799630/9781847799630.xml>, accessed 1 Oct 2024.
- Cable, Vince, "The tech titans must have their monopoly broken – and this is how we do it", *The Guardian*, 2018,

<https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/20/tech-monopoly-apple-facebook-data-extreme-content>, accessed 3 Jan 2025.

Cadwalladr, Carole, "The great British Brexit robbery: how our democracy was hijacked.", *The Guardian*, 2017, <https://www.theguardian.com/technology/2017/may/07/the-great-british-brexite-robbery-hijacked-democracy>, accessed 1 Oct 2024.

Cadwalladr, Carole and Emma Graham-Harrison, "Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach", *The Guardian*, 2018, <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election>, accessed 20 Sep 2024.

----, "Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach", *The Guardian*, 2018, <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election>, accessed 1 Oct 2024.

Calhoun, Craig, *Habermas and the Public Sphere*, The MIT Press, 1993.

"Cambridge Analytica bosses claimed they invented 'Crooked Hillary' campaign, won Donald Trump the presidency", *ABC*, 2018, <https://www.abc.net.au/news/2018-03-22/cambridge-analytica-claimed-it-secured-donald-trump-presidential/9570690?future=true&>, accessed 1 Oct 2024.

Castells, Manuel, *The Rise of the Network Society (The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume 1) 2nd Edition*, West Sussex: Wiley-Blackwell A John Wiley & Sons Ltd. Publication, 2010.

Cohen, Marshall, "Trump. Cambridge Analytica. WikiLeaks. The connections, explained.", *CNN*, 2017, <https://edition.cnn.com/2017/10/27/politics/trump-campaign-wikileaks-cambridge-analytica/index.html>, accessed 1 Oct 2024.

Comeforo, Kristin, "Review Essay: Manufacturing consent: The political economy of the mass media", *Global Media and Communication*, vol. 6, no. 2, SAGE Publications, 2010, pp. 218–30 [<https://doi.org/10.1177/1742766510373714>].

Dahlgren, Peter, "The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation", *Political Communication*, vol. 22, no. 2, Routledge, 2005, pp. 147–62 [<https://doi.org/10.1080/10584600590933160>].

"Data, Democracy and Dirty Tricks", *Channel 4*, 2018, <https://www.channel4.com/news/data-democracy-and-dirty-tricks-cambridge-analytica-uncovered-investigation-expose>, accessed 1 Oct 2024.

Detrow, Scott, "What Did Cambridge Analytica Do During The 2016 Election?", *NPR*, 2018, <https://www.npr.org/2018/03/20/595338116/what-did-cambridge-analytica-do-during-the-2016-election>, accessed 1 Oct 2024.

- Dews, Peter, *Autonomy and Solidarity: Interviews with Jürgen Habermas*, London, 1992.
- Diggs-Brown, Barbara, *Strategic Public Relations: An Audience-Focused Approach*, 1st edition, Cengage Learning, 2011.
- Ercan, Selen Ayirtman, “Deliberative Democracy”, in *Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy*, Thousand Oaks,, California, 2014 [https://doi.org/10.4135/9781483346229 NV - 2].
- “Facebook-Cambridge Analytica: MEPs demand action to protect citizens’ privacy”, *European Parliament*, 2018, https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181018IPR16525/facebook-cambridge-analytica-meps-demand-action-to-protect-citizens-privacy, accessed 3 Jan 2025.
- Fair, Lesley, “Commission issues opinion in Cambridge Analytica case”, *Federal Trade Commission*, 2019, https://www.ftc.gov/business-guidance/blog/2019/12/commission-issues-opinion-cambridge-analytica-case, accessed 3 Jan 2025.
- Finlayson, James Gordon and Dafydd Huw Rees, “Jurgen Habermas”, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Winter 202 edition, ed. by Edward N. Zalta and Uri Nodelman, Metaphysics Research Lab, 2023, https://plato.stanford.edu/archives/win2023/entries/habermas/.
- Fitzpatrick, Neil, “Media Manipulation 2.0: The Impact of Social Media on News, Competition, and Accuracy”, *Athens Journal of Mass Media and Communications*, vol. 4, no. 1, 2018, pp. 45–62 [https://doi.org/10.30958/ajmmc.4.1.3].
- Fowler, Linda L., “The Art of Political Manipulation. By William H. Riker”, *American Political Science Review*, vol. 81, no. 3, Cambridge University Press, 1987, pp. 982–3 [https://doi.org/DOI: 10.2307/1962694].
- Fuchs, Christian, *Social Media: A Critical Introduction*, London, 2014 [https://doi.org/10.4135/9781446270066].
- Habermas, Jürgen, “Habermas, Junger, The Structural Transformation of the Public Sphere, Cambridge, The MIT Press, 1991, pp. 301.”, *an Inquiry Into a Category of Bourgeois Society*, vol. 68, 1991.
- , *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, The MIT Press, 1996.
- , “Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research¹”, *Communication Theory*, vol. 16, no. 4, 2006, pp. 411–26 [https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2006.00280.x].

- Habermas, Jürgen, Sara Lennox, and Frank Lennox, "The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964)", *New German Critique*, no. 3, [New German Critique, Duke University Press], 1974, pp. 49–55 [https://doi.org/10.2307/487737].
- Habermas, Jürgen and William Outhwaite, *The Habermas Reader*, 1996.
- Haezer, Eben, "Menyoal Internet Sebagai Ruang Publik Dalam Perspektif Habermas", *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, vol. 4, no. 2, 2018, p. 181 [https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v4i2.301].
- Hal Schwartz, Eric, "Inside the Tech That Puts Political Ads on Your Screen", *The Business Journals*, 2016, https://www.bizjournals.com/washington/inno/stories/news/2016/02/08/political-ad-targeting-cambridge-analytica-adtech.html, accessed 1 Oct 2024.
- Harry, Davies, "Ted Cruz using firm that harvested data on millions of unwitting Facebook users", *The Guardian*, 2015, https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/11/senator-ted-cruz-president-campaign-facebook-user-data, accessed 1 Oct 2024.
- Herman, Edward Samuel and Noam Chomsky, *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*, New York: Pantheon Books, 1988.
- Hern, Alex, "Cambridge Analytica did work for Leave. EU, emails confirm", *The Guardian*, 2019, https://www.theguardian.com/uk-news/2019/jul/30/cambridge-analytica-did-work-for-leave-eu-emails-confirm, accessed 13 Nov 2024.
- Hughes, Chris, "It's Time to Break Up Facebook", *The New York Times*, 2019, https://www.nytimes.com/2019/05/09/opinion/sunday/chris-hughes-facebook-zuckerberg.html, accessed 3 Jan 2025.
- "Investigation into data analytics for political purposes", *Information Commissioner's Office*, 2018, https://ico.org.uk/action-weve-taken/investigation-into-data-analytics-for-political-purposes/, accessed 13 Nov 2024.
- Issenberg, Sasha, *The Victory Lab: The Secret Science of Winning Campaigns*, Crown, 2013.
- Jang, S. Mo and Joon K. Kim, "Third person effects of fake news: Fake news regulation and media literacy interventions", *Computers in Human Behavior*, vol. 80, 2018, pp. 295–302 [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.11.034].
- Junior, John Jay Trinckes, *The Definitive Guide to Complying with the HIPAA/HITECH Privacy and Security Rules*, 1st Editio edition, New York: Auerbach Publications, 2013 [https://doi.org/https://doi.org/10.1201/b13693].

- Kaelan, M..., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kaplan, Andreas M. and Michael Haenlein, "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media", *Business Horizons*, vol. 53, no. 1, 2010, pp. 59–68 [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003].
- Kruse, Lisa M., Dawn R. Norris, and Jonathan R. Flinchum, "Social Media as a Public Sphere? Politics on Social Media", *The Sociological Quarterly*, vol. 59, no. 1, Routledge, 2018, pp. 62–84 [https://doi.org/10.1080/00380253.2017.1383143].
- Lapowsky, Issie, "Former Cambridge Analytica CEO Faces His Ghosts in Parliament.", *Wired*, 2018, <https://www.wired.com/story/alexander-nix-parliament-testimony-cambridge-analytica/>, accessed 1 Oct 2024.
- , "How Cambridge Analytica Sparked the Great Privacy Awakening", *Wired*, 2019, <https://www.wired.com/story/alexander-nix-parliament-testimony-cambridge-analytica/>, accessed 1 Oct 2024.
- Lewis, Paul and Paul Hilder, "Leaked: Cambridge Analytica's blueprint for Trump victory", *The Guardian*, 2018, <https://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/23/leaked-cambridge-analyticas-blueprint-for-trump-victory>, accessed 1 Oct 2024.
- Meredith, Sam, "Facebook-Cambridge Analytica: A timeline of the data hijacking scandal", *CNBC*, 2018, <https://www.cnn.com/2018/04/10/facebook-cambridge-analytica-a-timeline-of-the-data-hijacking-scandal.html>, accessed 1 Oct 2024.
- Müller-Doohm, Stefan, *Habermas: a biography*, Polity, 2016.
- Murphy, Justin and Daniel Devine, "Does Media Coverage Drive Public Support for UKIP or Does Public Support for UKIP Drive Media Coverage?", *British Journal of Political Science*, vol. 50, no. 3, Cambridge University Press, 2020, pp. 893–910 [https://doi.org/DOI: 10.1017/S0007123418000145].
- Murray, Sara et al., "Inside the Trump campaign's ties with Cambridge Analytica", *CNN*, 2018, <https://edition.cnn.com/2018/03/21/politics/trump-campaign-cambridge-analytica/index.html>, accessed 1 Oct 2024.
- Naughton, John, "Anti-Social Media: How Facebook Disconnects Us and Undermines Democracy by Siva Vaidhyanathan – review", *The Guardian*, 2018.
- Newman, Nic et al., *Reuters Institute Digital News Report 2019*, 2019.
- Nielsen, Inga Mari, "Social Media as Digital Public Sphere", The Arctic University of Norway, 2018.

- Osborne, Hillary, “What is Cambridge Analytica? The firm at the centre of Facebook’s data breach”, *The Guardian*, 2018, <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/18/what-is-cambridge-analytica-firm-at-centre-of-facebook-data-breach>, accessed 1 Oct 2024.
- Overby, Peter, “Cambridge Analytica’s Legal Challenges”, *NPR*, 2018, <https://www.npr.org/2018/03/21/595481686/cambridge-analyticas-legal-challenges?t=1592750884058>, accessed 1 Oct 2024.
- Papacharissi, Zizi, “The virtual sphere: The internet as a public sphere”, *New Media & Society*, vol. 4, no. 1, SAGE Publications, 2002, pp. 9–27 [<https://doi.org/10.1177/14614440222226244>].
- Pariser, Eli, “The filter bubble : what the Internet is hiding from you”, *TA - TT -*, London SE - 294 pages; 22 cm: Viking/Penguin Press, 2011 [<https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/741018028>].
- Pegrum, Mark, *From Blogs to Bombs: The Future of Digital Technologies in Education*, Crawley, Western Australia: UWA Publishing, 2009.
- Pilkington, Ed and Ed Michel, “Obama, Facebook and the power of friendship: the 2012 data election”, *The Guardian*, 2019, <https://www.theguardian.com/world/2012/feb/17/obama-digital-data-machine-facebook-election>, accessed 3 Jan 2025.
- Radiansyah, Rifi Rivani, “Konsumerisme Hingga Hiper-Realitas Politik Di Ruang Publik Baru Era Cyber Space(Antara Kemunduran Atau Kemajuan Bagi Pembangunan Negara Indonesia Yang Demokratis)”, *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 3, nos. 2 SE-Articles, 2019, pp. 30–47, <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/116>.
- Ramsay, Adam and Peter Geoghegan, “How dark money is drowning British democracy”, *Open Democracy*, 2017, <https://www.opendemocracy.net/en/dark-money-investigations/how-dark-money-is-drowning-british-democracy/>, accessed 1 Oct 2024.
- Riker, William Harrison, *The Art of Political Manipulation*, Yale University Press, 1986.
- Rodrigues, Clara Alves, “Digital Gansters: Are Facebook and Google a challenge to democracy?”, *Amsterdam Law Forum*, 2019, <https://amsterdamlawforum.org/articles/10.37974/ALF.337>, accessed 1 Oct 2024.
- Romero, Leocadia Díaz, *On the Web and Contemporary Social Movements BT - Social Media in Politics: Case Studies on the Political Power of Social Media*, ed. by Bogdan Pătruț and Monica Pătruț, Cham: Springer International Publishing, 2014, pp. 19–33 [https://doi.org/10.1007/978-3-319-04666-2_2].

- Romm, Tony and Craig Timberg, "FTC opens investigation into Facebook after Cambridge Analytica scrapes millions of users' personal information", *The Washington Post*, 2018, <https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/03/20/ftc-opens-investigation-into-facebook-after-cambridge-analytica-scrapes-millions-of-users-personal-information/>, accessed 13 Nov 2024.
- Roose, Kevin and Cecilia Kang, "Mark Zuckerberg Testifies on Facebook Before Skeptical Lawmakers", *The New York Times*, 2018, <https://www.nytimes.com/2018/04/10/us/politics/zuckerberg-facebook-senate-hearing.html>, accessed 13 Nov 2024.
- Rosenberg, Matthew, Nicholas Confessore, and Carole Cadwalladr, "How Trump Consultants Exploited the Facebook Data of Millions.", *The New York Times*, 2018, <https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html>, accessed 1 Oct 2024.
- Scott, M., "Cambridge Analytica did work for Brexit groups, says ex-staffer", *Politico*, 2019, <https://www.politico.eu/article/cambridge-analytica-leave-eu-ukip-brexit-facebook/>, accessed 1 Oct 2024.
- Setiawan, FX. Rudi, "Peran Media Sosial Sebagai Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Gagasan Ruang Publik Jürgen Habermas", *Melintas*, vol. 39, no. 3, 2024, pp. 323–50 [<https://doi.org/10.26593/mel.v39i3.7826>].
- Sharpe, Emily, "For a healthy democracy, Facebook must halt micro-targeted political ads", *WebFoundation*, 2020, <https://webfoundation.org/2020/01/for-a-healthy-democracy-facebook-must-halt-micro-targeted-political-ads/>, accessed 1 Oct 2024.
- Shearer, Elisa and Katerina Eva Matsa, *News Use Across Social Media Platforms 2018*, 2018, <https://www.pewresearch.org/journalism/2018/09/10/news-use-across-social-media-platforms-2018/>.
- Simarmata, Salvatore, "Media Baru, Ruang Publik Baru, dan Transformasi Komunikasi Politik di Indonesia", *Interact*, vol. 3 No.2, 2020, pp. 18–36.
- Specter, Matthew G. (ed.), "Habermas: An Intellectual Biography", in *Habermas: An Intellectual Biography*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, pp. xiii–xiv [<https://doi.org/DOI: 10.1017/CBO9780511763083.001>].
- Stahl, Lesley, "Facebook 'embeds,' Russia and the Trump campaign's secret weapon", *CBS News*, 2017, <https://www.cbsnews.com/news/facebook-embeds-russia-and-the-trump-campaigns-secret-weapon/>, accessed 1 Oct 2024.
- "Statement on an agreement reached between Facebook and the ICO", *Information Commissioner's Office*, 2019, <https://www.wired-gov.net/wg/news.nsf/articles/Statement+on+an+agreement+reached+between>

+Facebook+and+the+ICO+30102019151000?open, accessed 3 Jan 2025.

Stead-Sellers, Frances, “Cruz campaign paid \$750,000 to ‘psychographic profiling’ company”, *The Washington Post*, 2015, https://www.washingtonpost.com/politics/cruz-campaign-paid-750000-to-psychographic-profiling-company/2015/10/19/6c83e508-743f-11e5-9cbb-790369643cf9_story.html, accessed 1 Oct 2024.

Tau, Byron, “Obama campaign launches mobile app”, *Politico*, 2012, <https://www.politico.com/blogs/politico44/2012/07/obama-campaign-launches-mobile-app-130576>, accessed 3 Jan 2025.

Tufekci, Zeynep, “Engineering the public: Big data, surveillance and computational politics”, *First Monday*, vol. 19, nos. 7 SE-, 2014 [<https://doi.org/10.5210/fm.v19i7.4901>].

Valtysson, Bjarki, “Facebook as a digital public sphere: Processes of colonization and emancipation”, *TripleC*, vol. 10, no. 1, 2012, pp. 77–91 [<https://doi.org/10.31269/triplec.v10i1.312>].

Vogel, K... and T. Parti, “Cruz partners with donor’s ‘psychographic’ firm”, *Politico*, 2015, <https://www.politico.com/story/2015/07/ted-cruz-donor-for-data-119813>, accessed 1 Oct 2024.

Weitzner, Daniel, “How Cambridge Analytica, Facebook and Other Privacy Abuses Could Have Been Prevented”, *Lawfare*, 2018, <https://www.lawfaremedia.org/article/how-cambridge-analytica-facebook-and-other-privacy-abuses-could-have-been-prevented>, accessed 3 Jan 2025.

Woolley, Samuel C. and Philip N. Howard (eds.), *Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, and Political Manipulation on Social Media*, Oxford University Press, 2018 [<https://doi.org/10.1093/oso/9780190931407.001.0001>].

Worrall, Patrick, “Vote Leave’s ‘dark’ Brexit ads”, *Channel 4*, 2018, <https://www.channel4.com/news/factcheck/factcheck-vote-leaves-dark-brexit-ads>, accessed 1 Oct 2024.

Youyou, Wu, Michal Kosinski, and David Stillwell, “Computer-based personality judgments are more accurate than those made by humans”, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 112, no. 4, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2015, pp. 1036–40 [<https://doi.org/10.1073/pnas.1418680112>].

Yueh, Linda, *The Great Economists: How Their Ideas Can Help Us Today*, Viking, 2018.

Zuboff, Shoshana, “The age of surveillance capitalism : the fight for a human future at the new frontier of power”, *Fight for a human future at the new frontier of power*, First edit edition, New York: PublicAffairs, 2019.

----, "Surveillance Capitalism or Democracy? The Death Match of Institutional Orders and the Politics of Knowledge in Our Information Civilization", *Organization Theory*, vol. 3, no. 3, SAGE Publications Ltd, 2022, p. 26317877221129290 [<https://doi.org/10.1177/26317877221129290>].

Zuckerberg, Mark, "From Facebook, answering privacy concerns with new settings", *The Washington Post*, 2010, <https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/05/23/AR2010052303828.html>, accessed 1 Oct 2024.

